

PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN OLEH ORANG ASING DAN PENDAFTARANNYA PADA SISTEM AHU *ONLINE* DITINJAU DARI PERATURAN MENGENAI ORGANISASI KEMASYARAKATAN ASING

Oleh : Khoirunnisa Nugrahani¹, M. Hawin²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisa, dan menjabarkan aturan-aturan hukum apa saja yang digunakan dalam proses pendirian badan hukum Yayasan yang didirikan oleh orang asing dan proses pendaftaran pada sistem AHU *Online* untuk mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sekaligus mencari permasalahan yang terjadi pada praktik pendirian Yayasan oleh orang asing.

Jenis penelitian ini menggunakan kombinasi dari penelitian hukum normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan menyesuaikan jenis penelitian hukum normatif-empiris yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara dengan responden yang ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling* sementara data sekunder didapat berdasarkan studi literasi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian bersifat deskriptif dengan hasil berupa analisa mengenai data sekunder dan primer.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah, terdapat keterkaitan antara regulasi pendirian Yayasan oleh orang asing dengan aturan hukum lain yakni mengenai Organisasi Kemasyarakatan. Masih ada Notaris yang tidak mengetahui hal ini dan mengakibatkan akta yang dibuat menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga akta tersebut ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM pada saat pendaftaran di sistem AHU *Online*. Dikarenakan pendirian Yayasan oleh orang asing berkaitan dengan orang asing, maka terdapat peran Kementerian Luar Negeri dalam proses pendirian Yayasan, yang dalam praktiknya tidak sejalan dengan keputusan yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM. Seperti dalam pemberian dokumen pertimbangan pengesahan yang telah disetujui pihak Kementerian Luar Negeri namun di tolak oleh Kementerian Hukum dan HAM. Notaris sebagai pejabat umum diberi wewenang untuk membuat akta pendirian Yayasan, wewenang tersebut seharusnya diikuti dengan tanggung jawab untuk selalu menambah wawasan mengenai aturan-aturan hukum yang ada.

Kata kunci : *Pendirian Yayasan oleh Orang Asing, Sistem AHU Online, Organisasi Kemasyarakatan Asing, Akta Notaris*

¹ Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustitia No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281.

ESTABLISHMENT OF LEGAL ENTITY FOUNDATION BY FOREIGNERS AND ITS REGISTRATION ON AHU ONLINE SYSTEM BASED ON REGULATIONS OF FOREIGN COMUNITY ORGANIZATIONS

By : Khoirunnisa Nugrahani¹, M. Hawin²

ABSTRACT

This research aims to understand, analyze, and describe what legal rules are used in the process of establishing a legal entity Foundation by foreigners and the registration process in the AHU Online system to obtain ratification from the Ministry of Law and Human Rights. As well as looking for problems that occur in the practice of establishing Foundations by foreigners.

This research use the combination of normative and empirical legal research. The type of data adjusts the normative-empirical legal research, primary data and secondary data. Primary data is obtained through interviews with respondents determined based on purposive sampling method while secondary data is obtained based on literacy studies on primary legal materials and secondary legal materials. The research is descriptive with results in the form of analysis of secondary and primary data.

The conclusion obtained from this research is there is a connection between the regulation of establishment of Foundations by foreigners and Community Organization. Some Notaries do not know about this so the deed made is not in accordance with the laws and regulations causing the deed being rejected by the Ministry of Law and Human Rights at the time of registration in the AHU Online system. In addition, because the establishment of the Foundation by foreigners is related to foreigners, there is a role of Ministry of Foreign Affairs in the process of establishing the Foundation, which in practice is not in line with the decision given by the Ministry of Law and Human Rights. As in the provision of legalization consideration documents that have been approved by the Ministry of Foreign Affairs but rejected by the Ministry of Law and Human Rights. Notary as a public official is authorized to make a deed of establishment of the Foundation, this authority should be followed by the responsibility to always add insight into existing legal rules.

Key Words: *Establishment of Foundation by Foreigner, AHU Online System, Foreign Community Organization, Notarial Deed*

¹ Student of Master of Notary Degree at Postgraduate Program, Law Faculty of Gadjah Mada University, Yogyakarta, Balikpapan City, East Kalimantan.

² Professor of Law Faculty of Gadjah Mada University, Jl. Sosio Yustitia No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281.